

**BAB V****PENUTUP****A. Kesimpulan**

1. Penerapan sanksi bagi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)

yang melanggar aturan mengenai disiplin kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Walikota

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tenaga Honorer/Pegawai Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Batu. PPPK yang melanggar disiplin kerja berat akan diberhentikan, sedangkan bagi PPPK yang melanggar disiplin kerja ringan didisposisi di BKD bidang PKP (Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai) untuk mempermudah melakukan pengawasan.

2. Kendala yang dihadapi Badan Kepegawaian Daerah dalam penerapan sanksi bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang melanggar aturan mengenai disiplin kerja yaitu kurangnya informasi karena keterlambatan penyerahan data dari SKPD ke BKD, kurangnya sumber daya manusia untuk merekap data di 38 (tiga puluh delapan) SKPD, pengaruh budaya setempat yang menjunjung tinggi nilai toleransi, kurangnya sosialisasi peraturan-peraturan kepada PPPK, cara kerja mesin *fingerprint* (mesin sidik jari) tidak akurat, serta lemahnya kesadaran diri dari PPPK. Sedangkan Upaya Badan Kepegawaian Daerah dalam mengatasi yaitu dengan melakukan pengawasan serta mengingatkan setiap bulannya kepada semua SKPD di Kota Batu untuk mengirimkan semua data PPPK yang berhubungan dengan kepegawaian.





Sedangkan penanganan kendala yang terkait dengan mesin *fingerprint* yang tidak akurat, BKD mengupayakan dengan setiap bulan mengecek di tiap SKPD bagaimana kinerja dari mesin tersebut, dan jika ada kerusakan akan segera diperbaiki. Selain itu BKD mewajibkan pada tiap SKPD untuk menggunakan absen manual di samping absen dengan sidik jari sehingga data dapat dicocokkan dengan mudah dan akurat.

## **B. Saran**

1. Melakukan bimbingan dan arahan kepada PPPK di tiap SKPD akan pentingnya disiplin kerja dalam melaksanakan pekerjaan serta meningkatkan pengawasan kepada PPPK di tiap SKPD untuk meminimalisir kendala-kendala yang terjadi yang dapat menghambat BKD dalam memberikan sanksi.
2. Memberikan sanksi yang lebih tegas kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang melanggar aturan mengenai disiplin kerja.